KOMISI VIII
Agama, Sosial, Perempuan dan Anak

Analisis Strategis terhadap Isu Aktual
INFO Singkat

VOL. XVII, NO. 10/II/PUSAKA/MEI/2025

DARI PELINDUNGAN KE PEMBERDAYAAN: TANTANGAN DAN STRATEGI GRADUASI KPM PKH

Dwiarti Simanjuntak*

Abstrak

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu instrumen utama pelindungan sosial di Indonesia yang bertujuan mengurangi kemiskinan melalui bantuan bersyarat. Namun, seiring berjalannya waktu, ketergantungan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhadap bantuan menjadi tantangan tersendiri. Tulisan ini membahas perlunya perubahan paradigma dari pelindungan sosial menuju pemberdayaan guna mendorong kemandirian KPM dan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan. Selain itu, dibahas pula berbagai tantangan dan strategi percepatan graduasi KPM PKH. Tantangan utama meliputi ketidakakuratan data sosial ekonomi, resistensi KPM terhadap proses graduasi, serta terbatasnya akses terhadap pekerjaan dan usaha produktif. Strategi yang diusulkan antara lain transformasi bertahap pelindungan sosial berbasis pemberdayaan, integrasi sistem data digital, penguatan peran pendamping sosial, dan kolaborasi lintas sektor dalam pemberdayaan ekonomi berbasis UMKM. Komisi VIII DPR RI memiliki peran strategis melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk mendorong sinergi antarpemangku kepentingan dalam memastikan proses graduasi yang efektif dan berkelanjutan.

Pendahuluan

Program Keluarga Harapan (PKH) yang diluncurkan pada 2007 merupakan salah satu program bantuan sosial (bansos) bersyarat terbesar di Indonesia yang menyasar kurang lebih 10 juta KPM, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin melalui dukungan di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial (Syamsulhakim & Khadijah, 2021). Namun, tantangan muncul karena sebagian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi bergantung pada bantuan dalam jangka panjang.

Menanggapi tantangan tersebut di atas, Kementerian Sosial (Kemensos) mulai mendorong transformasi dari sekedar pelindungan sosial menuju pemberdayaan berkelanjutan. Hal ini bertujuan agar KPM mandiri dan keluar dari kemiskinan atau mengalami graduasi (Kementerian Sosial, 2025). Salah satu kisah sukses pemberdayaan KPM adalah Siti

*) Analis Legislatif Ahli Pertama Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI.
Email: dwiarti.simanjuntak@dpr.go.id

Halimatusa'diyah dari Probolinggo, yang setelah dua tahun menjadi peserta PKH berhasil menjalankan usaha kue dengan penghasilan Rp2.500.000 per bulan (Kementerian Sosial, 2025). KPM lain diharapkan dapat mengalami hal serupa (graduasi), sebagaimana tujuan dari pemberdayaan dalam program PKH.

Sebagai bagian dari upaya ini, pada 2 Mei 2025 Kemensos melakukan percepatan graduasi 500 KPM di Provinsi Jawa Timur setelah menerapkan pendekatan pemberdayaan. Selanjutnya pada pertengahan Mei 2025 Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, menyampaikan bahwa bansos bersifat sementara dan perlu dievaluasi secara berkala setiap lima tahun (Putri, 2025). Untuk itu, tulisan ini membahas perlunya perubahan paradigma dari pelindungan sosial menuju pemberdayaan guna mendorong kemandirian KPM dan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan. Selain itu, dibahas pula berbagai tantangan dan strategi percepatan graduasi KPM PKH.

Dari Pelindungan Menuju Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah proses terencana yang bertujuan untuk mengubah kondisi ketidakberdayaan individu atau masyarakat menjadi berdaya, dengan penekanan pada peningkatan kemandirian, partisipasi aktif, dan kapasitas untuk menentukan masa depan sendiri. Konsep ini mencakup pemberian akses terhadap sumber daya, pengetahuan, dan keterampilan, serta menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam pembangunan (Malta, 2023). Perubahan paradigma dari pelindungan menuju pemberdayaan dalam program PKH dirancang untuk memastikan bahwa KPM tidak hanya keluar dari kemiskinan sementara, namun memiliki kemampuan bertahan dalam jangka panjang karena adanya kemandirian (Nurhidayat, 2025).

Pendekatan pemberdayaan ini melibatkan peran aktif pilar-pilar sosial, seperti Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pendamping PKH, Tagana, dan Karang Taruna dalam mengedukasi dan mendampingi KPM agar tidak bergantung pada bantuan, melainkan mengembangkan potensi diri melalui pelatihan dan bantuan modal usaha. Skema dirancang seperti model pembangunan sosial yang dilakukan melalui tiga fase: bansos sebagai jaring pengaman awal, pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan literasi, dan terakhir pemberdayaan ekonomi berbasis UMKM. Prosesnya dirancang bertahap: dari Desil 1 ke Desil 2 dan seterusnya, dengan transisi dukungan antarkementerian sesuai tahapan pemberdayaan (Nurhidayat, 2025). Dengan demikian, pemahaman terhadap perubahan paradigma ini penting sebagai landasan dalam menyusun strategi percepatan graduasi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Tantangan dan Strategi Graduasi KPM PKH

Menurut Peraturan Menteri Sosial RI No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, graduasi adalah proses keluarnya KPM dari PKH, baik karena tidak lagi memenuhi syarat (graduasi alami) maupun karena telah mandiri secara sosial

ekonomi/graduasi sejahtera mandiri (Syamsulhakim & Khadijah, 2021). Tujuan utama graduasi adalah memperluas cakupan program kepada yang lebih membutuhkan dan mendorong kemandirian. Kemensos menargetkan setiap dari 34.000 pendamping PKH mampu menggraduasi minimal 10 KPM per tahun, sehingga total target nasional mencapai 340.000 KPM per tahun (Putri, 2025).

Di sisi lain, proses graduasi KPM PKH ini memiliki tantangan yang perlu mendapatkan perhatian. Salah satu tantangan mendasar adalah akurasi dan integrasi data. Banyak data tidak diperbarui secara rutin sehingga kondisi riil KPM tidak tercermin dan banyak yang tetap tercatat sebagai penerima meskipun sudah tidak layak. Hal ini tidak hanya menghambat penyaluran bantuan yang tepat sasaran, tetapi juga mengganggu pelaksanaan program pemberdayaan yang seharusnya menjadi bagian dari proses menuju graduasi. Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo, menyampaikan bahwa sebelumnya terdapat 47 persen data sosial yang saling tumpang tindih antarlembaga (Nurhidayat, 2025).

Penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi langkah strategis karena memungkinkan pemutakhiran data setiap tiga bulan. Sebelum diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN, penyaluran bantuan sosial sering terkendala oleh data yang usang dan tidak terintegrasi, yang pada akhirnya menimbulkan inefisiensi anggaran dan ketidakadilan dalam distribusi (Gewati, 2025). DTSEN kini menggantikan peran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis data utama, dengan harapan menciptakan sistem penyaluran bansos yang lebih akurat dan akuntabel. Strategi ke depan mencakup integrasi digital lintas sektor serta pemutakhiran data secara partisipatif dan bebas manipulasi (Putri, 2025).

Tantangan kedua adalah resistensi sebagian KPM yang sudah sejahtera namun enggan keluar dari program. Hal ini antara lain disebabkan oleh tidak diterapkannya instrumen resertifikasi sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksana PKH yang seharusnya dilakukan pada tahun kelima untuk menentukan kelayakan masa transisi atau graduasi. Banyak KPM tetap menerima bantuan hingga lebih dari sembilan tahun. Selain itu, perbedaan persepsi di antara SDM PKH juga menjadi faktor penghambat. Sebagian pendamping melihat graduasi sejahtera mandiri sebagai bagian dari tujuan program, sementara yang lain menganggap hal tersebut menjadi tanggung jawab Kemensos melalui resertifikasi, sehingga tidak mengambil inisiatif untuk mendorong graduasi (Suryati et al., 2023).

Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan pendekatan berbasis perubahan perilaku melalui edukasi sosial, konseling, dan pembentukan *role model* KPM sukses. Dalam konteks ini, peran petugas lapangan menjadi krusial dalam menilai kesiapan KPM dan mendampingi agar KPM berani menuju proses transisi hingga digraduasi (Gewati, 2025). Pemerintah juga dapat mempertimbangkan insentif berupa bantuan transisi atau apresiasi bagi KPM yang berhasil melakukan graduasi.

Tantangan ketiga adalah terbatasnya akses KPM terhadap pekerjaan layak dan usaha produktif. Survei Angkatan Kerja Nasional 2019 mencatat bahwa lebih dari 63,32% anggota rumah tangga PKH bekerja di sektor informal yang tidak memiliki pelindungan hukum maupun jaminan sosial (Syamsulhakim & Khadijah, 2021). Pendapatan pekerja informal pun umumnya jauh lebih rendah dibandingkan pekerja formal.

Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan penguatan pemberdayaan ekonomi berbasis lokal, seperti pengembangan UMKM, koperasi, pelatihan keterampilan, dan perluasan akses permodalan. Berbagai program seperti Kelompok Usaha Bersama Ekonomi (KUBE), Program Kewirausahaan Sosial (ProKUS) dari Kemensos, serta pelatihan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, maupun Kementerian Ketenagakerjaan, telah berperan sebagai jembatan menuju kemandirian ekonomi. Di sisi lain, akses pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), kredit jangka pendek, dan pembiayaan ultramikro (UMi) juga menjadi instrumen penting bagi kelompok yang tidak terjangkau layanan perbankan/unbankable (Syamsulhakim & Khadijah, 2021).

Pada akhirnya, penanggulangan kemiskinan adalah tanggung jawab kolektif yang tidak dapat dipikul oleh satu pihak saja. Upaya ini menuntut sinergi lintas sektor dan lintas wilayah, serta keterlibatan aktif seluruh elemen bangsa. Lebih dari sekadar intervensi kebijakan, pengentasan kemiskinan harus menjadi gerakan bersama yang berakar pada kesadaran bahwa perubahan sejati bermula dari pemberdayaan. Pergeseran paradigma dari pelindungan sosial menuju pemberdayaan menandai titik balik penting bahwa masyarakat miskin bukan sekedar penerima bantuan, tetapi subjek pembangunan yang memiliki potensi untuk tumbuh dan mandiri. Dengan menempatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat sebagai pusat strategi, upaya pengentasan kemiskinan diarahkan pada solusi yang tidak hanya bersifat temporer, tetapi juga berkelanjutan serta bermartabat.

Penutup

Transformasi pelindungan sosial menuju pemberdayaan merupakan kebutuhan mendesak untuk memastikan pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan di Indonesia. Graduasi KPM bukan hanya mengeluarkan nama KPM dari daftar bansos, tetapi memastikan mereka betul-betul siap hidup mandiri. Tiga tantangan utama yakni akurasi data, resistensi KPM, dan keterbatasan akses pekerjaan, harus ditangani secara terintegrasi. Strategi nasional melalui DTSEN, penguatan pendamping sosial, dan perluasan pemberdayaan ekonomi menjadi kunci penting dalam mendukung percepatan graduasi KPM PKH.

Komisi VIII DPR RI, melalui fungsi pengawasan, memegang peran krusial dalam memastikan Kemensos menjalankan tugas dan fungsinya dalam pengentasan kemiskinan melalui kebijakan yang transformatif berbasis pemberdayaan. Sedangkan dalam fungsi anggaran, harus memastikan anggaran yang dikeluarkan bukan hanya

untuk memberi bansos melainkan digunakan untuk kegiatan yang berdampak bagi kemandirian masyarakat. Kolaborasi lintas kementerian, evaluasi rutin, dan pendekatan partisipatif akan menentukan keberhasilan jangka panjang transformasi ini. Graduasi yang berhasil bukanlah akhir, melainkan awal dari kemandirian sejati keluarga miskin di Indonesia.

Referensi

- Gewati, M. (2025, Februari 17). Kemensos percepat graduasi KPM dari bansos, Gus Ipul: yang mampu harus mandiri. *Kompas.com,* https://nasional.kompas.com/read/2025/02/17/13412491/kemensos-percepat-graduasi-kpm-dari-bansos-gus-ipul-yang-mampu-harus-mandiri
- Kementerian Sosial. (2025, Mei 2). Kementerian sosial graduasi 500 KPM PKH, naik kelas jadi mandiri. Kemensos.go.id. https://kemensos.go.id/berita-terkini/menteri-sosial/Kementerian-Sosial-Graduasi-500-KPM-PKH
- Malta, M. (2023). The Concept of Strategy in Community Empowerment: A Literature Review. Influence, 5(3), 24–34. https://doi.org/10.54783/influencejournal.v5i3.179
- Nurhidayat, D. (2025, Mei 15). Kemensos ingin ubah paradigma bantuan sosial, prioritaskan pemberdayaan. *Metro TV News*. https://www.metrotvnews.com/read/kELCznmp-kemensos-ingin-ubah-paradigma-bantuan-sosial-prioritaskan-pemberdayaan
- Putri, I. (2025, Mei 16). Pesan Mensos ke pendamping PKH: tugas utama bukan hanya bagikan bansos. *Detik.com*. https://news.detik.com/berita/d-7916905/pesan-mensos-ke-pendamping-pkh-tugas-utama-bukan-hanya-bagikan-bansos
- Suryati, L, Rangga, K., Indriyani, Y., Sayekti, W., & Syarief, Y. (2023). Faktor-faktor pendorong dan penghambat graduasi sejahtera mandiri penerima program keluarga harapan di Kabupaten Lampung Tengah. *Suluh Pembangunan Journal of Extension and Development, 5*(2), 112–122. https://doi.org/10.23960/jsp.vol5.no2.2023.216
- Syamsulhakim, E., & Khadijah, N. (2021). Graduasi dari program bantuan tunai bersyarat di Indonesia: Hasil dari survei rumah tangga graduasi Sejahtera mandiri Program Keluarga Harapan (PKH), pada tahun 2020. *Worldbank.org*. https://documents1.worldbank.org/curated/en/099600012222121722/pdf/P1605900731f410730af2306a8be9ddde3b.pdf

© 2009

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.